

tinggi ternama di Indonesia. Ketika para mahasiswa ditanya tentang pelaksanaan *amar makruf nahi munkar* dalam bentuk *sweeping* tempat-tempat yang dianggap sumber maksiyat, mereka menjawab sebagai berikut: sekitar 65% (1594 responden) mendukung dilaksanakannya *sweeping* kemaksiyatan, 18% (446 responden) mendukung sekaligus berpartisipasi aktif dalam kegiatan *sweeping*. Selanjutnya, mereka yang mendukung *sweeping* beralasan bahwa kegiatan *sweeping* tersebut sebagai bagian dari perintah agama (88%), mendukung *sweeping* karena berpendapat bahwa aparat keamanan tidak mampu menegakkan hukum (4%), dan karena alasan dekadensi moral (8%) (Fadjar, 2007 : 35).

Fenomena kekerasan atas nama agama yang sering dikenal dengan radikalisme agama semakin tampak garang ketika muncul berbagai peristiwa teror pemboman di tanah air. Beberapa peristiwa teror dalam bentuk pengeboman telah memakan banyak korban dan berdampak luas terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Setidaknya telah terjadi lebih dari 20 kali peristiwa pemboman sejak tahun 2000 sampai sekarang (Wikipedia, 2017). Jaringan terorisme terus bekerja dan perekrutan orang baru untuk

menjalankan aksi teror masih berlangsung, meski tokoh-tokoh utama pelaku teror sudah ditahan. Hal ini sejalan dengan temuan Wahid Foundation dalam laporannya tahun 2014, ditemukan bahwa dari 230 organisasi yang telah berdiri sejak zaman Orde Lama, 147 diidentifikasi sebagai organisasi intoleran, 49 organisasi memiliki kecenderungan pada radikalisme, dan 34 organisasi terindikasi sebagai kelompok terror.

Penelitian ini mengambil lokasi di Lamongan karena kota ini menyumbang banyak sekali tokoh-tokoh terorisme yang ada di Indonesia. Mengutip laporan IPAC (*Institute for Policy Analysis of Conflict*) soal Jaringan Lamongan, kota ini dikenal sebagai wilayah dengan sekolah-sekolah agama penelur tokoh teror. Analisis yang dilakukan terhadap hubungan tokoh-tokoh di Lamongan menunjukkan jaringan alumni pesantren Al Islam dan sekolah lainnya pernah berhubungan dengan organisasi Jamaah Islamiyah. Walaupun tokoh-tokoh ini bukan atau dalam beberapa kasus, bukan lagi anggota JI, sekolah-sekolah ini tetap menjadi komponen penting untuk komunitas ekstremis setelah JI sendiri sudah berhenti, setidaknya sementara, melakukan kekerasan.

segala budaya non asal Islam (budaya Timur Tengah) termasuk berhati-hati menerima tradisi lokal karena khawatir mencampuri Islam dengan *bid'ah*. *Keempat*, menolak ideologi Non-Timur Tengah termasuk ideologi Barat, seperti demokrasi, sekularisme dan liberalisme. *Kelima*, gerakan kelompok ini sering berseberangan dengan masyarakat luas termasuk pemerintah. Oleh karena itu, terkadang terjadi gesekan ideologis bahkan fisik dengan kelompok lain, termasuk pemerintah.²

Menurut Simon Tormey dalam *International Encyclopedia of Social Sciences* (Vol.7, hal 48), radikalisme merupakan sebuah konsep yang bersifat kontekstual dan posisional, dalam hal ini kehadirannya merupakan antitesis dari ortodoks atau arus utama (*mainstream*), baik bersifat sosial, sekuler, saintifik, maupun keagamaan. Menurutnya, radikalisme tidak mengandung seperangkat gagasan dan argumen, melainkan lebih memuat posisi dan ideologi yang mempersoalkan atau menggugat sesuatu (atau segala sesuatu) yang dianggap mapan, diterima, atau menjadi pandangan umum.³ Radikalisme

adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Sedangkan Kelompok Islam radikal adalah sebuah gerakan politik ekstrim yang berusaha membentuk negara Islam melalui perjuangan bersenjata. Dimana terdapat doktrin-doktrin pada kelompok untuk membenarkan tindakan kekerasan untuk menghilangkan rezim di dunia yang dianggap kafir saat ini. Dan karena tindakan kekerasan inilah, maka gerakan Islam radikal seringkali di cap sebagai teroris oleh negara-negara barat khususnya Amerika.⁴

Radikalisasi adalah proses perubahan di mana kelompok mengalami transformasi ideologi atau perilaku yang mengarah pada penolakan prinsip-prinsip demokrasi dengan cara menuntut untuk dilakukannya revolusi di bidang sosial politik, sosial ekonomi, dan perubahan budaya dengan jalan kekerasan atau peningkatan tingkat kekerasan, untuk mencapai tujuan politik. Pada dasarnya radikalisasi muncul akibat adanya kesenjangan dan

² A. Rubaidi, *Radikalisme Islam, Nahdlatul Ulama; Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2010), hlm. 63

³ Azca, Muhammad Najib. Yang Muda, Yang Radikal: Refleksi Sosiologis Terhadap Fenomena Radikalisme Kaum Muda Muslim di Indonesia

Pasca Orde Baru. *Jurnal Maarif*, Vol. 8, No. 1 (Juli 2013): 14-41.

⁴ Cavatorta, Francesco, (2005). The 'War on Terrorism'—Perspectives from Radical Islamic Groups. *Journal of Irish Studies in International Affairs*, Vol. 16 (2005). Diakses dari http://doras.dcu.ie/488/1/isia_16_April_2017.pdf

marjinalisasi politik. Adapun tujuan dari kelompok-kelompok radikal di Indonesia adalah menciptakan negara Islam. Dalam mencapai tujuan, kelompok ini melakukan proses rekrutmen anggota mulai dari tingkat sekolah hingga universitas. Dan biasanya proses indoktrinasi ini dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler agama yang ada di sekolah maupun perguruan tinggi. Ada 3 cara yang dapat ditempuh untuk menganalisis munculnya gerakan Islam radikal di Indonesia yakni: 1. Konteks historis; munculnya Islam radikal di Indonesia. 2. Konteks global; kebangkitan gerakan jihad, 3. Implementasi syariah sebagai ideologi negara.⁵

Radikalisme memiliki istilah yang beragam, ada yang menyebut radikalisme dengan istilah fundamentalisme, ada pula yang menyebutnya sebagai ekstrimisme bahkan ada pula yang mengaitkannya dengan terorisme. Penamaan ini disebabkan karena makna yang terkandung dalam istilah-istilah tersebut hampir sama. Jika radikalisme disebut sebagai paham yang cenderung menggunakan jalan kekerasan, maka istilah fundamentalisme dimaknai

sebagai paham yang cenderung untuk memperjuangkan sesuatu secara radikal, selanjutnya ekstrimisme dimaknai sebagai paham yang cenderung ekstrim (keras). Selanjutnya istilah terorisme sering pula dikaitkan dengan radikalisme karena terorisme mengandung makna penggunaan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut dalam usaha mencapai suatu tujuan.⁶

Terorisme

Terorisme bukan persoalan siapa pelaku, kelompok dan jaringannya. Namun, lebih dari itu terorisme merupakan tindakan yang memiliki akar keyakinan, doktrin dan ideologi yang dapat menyerang kesadaran masyarakat. Tumbuh suburnya terorisme tergantung di lahan mana ia tumbuh dan berkembang. Jika ia hidup di tanah gersang, maka terorisme sulit menemukan tempat, sebaliknya jika ia hidup di lahan yang subur maka ia akan cepat berkembang. Ladang subur tersebut menurut Hendropriyono adalah masyarakat yang dicemari oleh paham fundamentalisme ekstrim atau radikalisme keagamaan.⁷

⁵ Hasan, Noorhaidi. *Islam di Ruang Publik; Politik Identitas dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta; Center for Study of Religion and Culture-KAS, 2010.

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed.II; Jakarta: Balai Pustaka, Hlm. 281, 255, 1048

⁷ A.M. Hendropriyono, *Terorisme: Fundamentalisme Kristen, Yahudi dan Islam* (Jakarta: Buku Kompas, 2009), hlm. 13.

Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi yang ekstrem. Ada beberapa ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal. 1. Intoleran (tidak mau menghargai pendapat & keyakinan orang lain), 2. Fanatik (selalu merasa benar sendiri; menganggap orang lain salah), 3. Eksklusif (membedakan diri dari umat Islam umumnya) dan 4. Revolusioner (cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan).

Memiliki sikap dan pemahaman radikal saja tidak mesti menjadikan seseorang terjerumus dalam paham dan aksi terorisme. Ada faktor lain yang memotivasi seseorang bergabung dalam jaringan terorisme. Motivasi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, Faktor domestik, yakni kondisi dalam negeri yang semisal kemiskinan, ketidakadilan atau merasa Kecewa dengan pemerintah. *Kedua*, faktor internasional, yakni pengaruh lingkungan luar negeri yang memberikan daya dorong tumbuhnya sentiment keagamaan seperti ketidakadilan global, politik luar negeri yg arogan, dan imperialisme modern negara adidaya.

Ketiga, faktor kultural yang sangat terkait dengan pemahaman keagamaan yang dangkal dan penafsiran kitab suci yang sempit dan leksikal (*harfiyah*). Sikap dan pemahaman yang radikal dan dimotivasi oleh berbagai faktor di atas seringkali menjadikan seseorang memilih untuk bergabung dalam aksi dan jaringan terorisme.

Lalu apa itu terorisme ? Banyak ragam pengertian dalam mendefinisikan terorisme. Dari beragam definisi baik oleh para pakar dan ilmuwan maupun yang dijadikan dasar oleh suatu negara, setidaknya memuat tiga hal: *pertama*, metode, yakni menggunakan kekerasan; *kedua*, target, yakni korban warga sipil secara acak, dan *ketiga* tujuan, yakni untuk menebar rasa takut dan untuk kepentingan perubahan sosial politik.⁸ Karena itulah, definisi yang dijadikan dasar oleh negara Indonesia dalam melihat terorisme pun tidak dilepaskan dari tiga komponen tersebut Dalam UU No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme disebutkan : Setiap orang yang *dengan sengaja menggunakan kekerasan* atau ancaman kekerasan menimbulkan situasi teror atau *rasa takut* terhadap orang *secara meluas* atau

⁸ Harvey W. Kushner, *Encyclopedia of Terrorism*, London : Sage Publication, 2003. Hlm. Xxiii.

menimbulkan *korban yang bersifat massal*, dengan cara merampas harta benda orang lain, atau mengakibatkan *kerusakan atau kehancuran* terhadap obyek-obyek vital strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.⁹

Dari Intoleran dan Radikalisme hingga menjadi Terorisme

Nilai Budaya dan Praktik Sosial

Di lapisan dasar, nilai budaya dan praktik sosial berperan dalam menghasilkan kecenderungan toleran/intoleran dan radikal. Praktik toleransi/intoleransi dan radikalisme terkait dengan nilai dan praktik sosial yang ada di masyarakat. Apa yang diyakini oleh individu-individu di masyarakat dapat dipahami sebagai representasi sosial, sebagai ide dan keyakinan yang ada di masyarakat, yang diinternalisasi oleh individu. Representasi sosial adalah sekumpulan nilai, ide, metafora, keyakinan, dan praktik yang dibagi bersama di antara anggota kelompok dan komunitas (Moscovici, 1973).

Representasi sosial itu memungkinkan orang-orang dalam satu kelompok atau komunitas berbicara satu sama lain dan bertindak bersama serta

saling berinteraksi. Itu menjadi seperangkat pengertian bersama dan memandu praktik sosial. Sistem nilai, ide dan praktik itu memiliki dua fungsi. *Pertama*, menegakkan keteraturan yang akan memungkinkan individu mengorientasikan dirinya dalam dunia material dan sosial, serta memampukannya melakukan penyesuaian diri dan penanganan lingkungan. *Kedua*, memungkinkan komunikasi mengenai beragam aspek dunia, individu dan kelompok berlangsung di antara anggota komunitas dengan menyediakan bagi peserta komunikasi kode untuk pertukaran sosial, penamaan dan klasifikasi secara jelas. Makna dikreasi melalui sistem negosiasi sosial ketimbang hal yang sudah ajek dan terdefiniskan. Penafsirannya mensyaratkan pengertian atas aspek tambahan dari lingkungan sosial.

Kondisi Perekonomian

Di lapisan berikutnya, kondisi perekonomian berperan dalam menghasilkan kecenderungan toleran/intoleran dan radikal. Kondisi perekonomian yang meleluasakan warga mengambil peranan dan memperoleh sumber daya memadai atau relatif merata, disertai ketimpangan ekonomi relatif rendah, mencegah timbulnya

⁹ Lihat UU No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

kecenderungan intoleransi dan radikalisme.

Keragaman Sumber Norma

Di lapisan berikutnya ditemukan faktor keragaman sumber norma ikut berperan dalam kecenderungan toleransi/intoleransi dan radikalisme. Masyarakat yang hanya berpegang pada satu atau sedikit sumber norma menampilkan kecenderungan intoleransi yang lebih tinggi, dari pada masyarakat yang mengandalkan banyak sumber norma. Namun perlu ditegaskan pula, beragam sumber norma itu harus memiliki hubungan positif atau kesesuaian antara satu dan lainnya, jika tidak maka bisa terjadi kebingungan pada warganya, untuk mengikuti norma yang mana dalam kehidupannya sehari-hari.

Pengaruh Tokoh Signifikan

Di lapisan berikutnya, faktor pengaruh tokoh yang signifikan dan dianggap penting oleh warga turut berperan terhadap kecenderungan toleransi/intoleransi dan radikalisme.

Kehadiran dan Keberfungsian Negara

Di lapisan paling atas, kehadiran dan keberfungsian negara berperan sebagai faktor penting dalam kecenderungan toleransi/intoleransi dan radikalisme. Di Kabupaten Lamongan yang diteliti ditemukan peran kehadiran

dan keberfungsian negara dalam gejala toleransi/intoleransi dan radikalisme. Peran negara yang diwakili pemerintah daerah dapat meningkatkan atau menurunkan gejala intoleransi dan radikalisme. Jika negara hadir dan menjalankan fungsi-fungsi yang efektif dan menjaga toleransi, maka kecenderungan toleransi pada warga akan lebih besar. Peran negara yang dimaksud di sini adalah berikap netral dan tegas, bekerja sesuai payung hukum yang tidak diskriminatif, antisipatif dengan menyiapkan semacam sistem peringatan dini (*Early Warning System*) kepada warga, untuk menghindar dari kecenderungan intoleransi dan radikal, serta mampu memediasi dan koordinasi. Gejala toleransi/intoleransi dan radikalisme disebabkan oleh lebih dari satu faktor yang secara bersama-sama bekerja. Dalam pencermatan terhadap empat kota yang diteliti, semua faktor itu bekerja bersama-sama dalam porsi tertentu dalam menghasilkan kecenderungan toleransi/intoleransi dan radikalisme. Skema berikut ini meringkas faktor-faktor yang sudah dipaparkan di atas.

Intoleransi didefinisikan sebagai ketidakediaan atau ketidakmauan untuk memberikan hak pada orang atau kelompok yang berbeda, baik berbeda

Gejala toleransi/intoleransi dan radikalisme memiliki lebih dari satu sebab (*multicausal*). Seperti gejala sosial pada umumnya, tidak ada penyebab tunggal dari toleransi/intoleransi. Selain itu, bukan hanya keberadaan faktor tertentu saja yang memunculkan gejala toleransi/intoleransi, melainkan juga bagaimana hubungan antar faktor. Keberadaan semua faktor tersebut saja belum tentu memunculkan intoleransi atau radikalisme. Tanpa adanya hubungan yang signifikan antara faktor, gejala toleransi/intoleransi tidak muncul. Guna dapat memahami gejala toleransi/intoleransi dan radikalisme dibutuhkan analisis komprehensif, terhadap faktor-faktornya serta pencermatan terhadap hubungan antara faktor-faktor itu.

Meskipun ada banyak faktor yang berperan dalam munculnya gejala toleransi/ intoleransi dan radikalisme, berdasarkan model yang dihasilkan studi ini, ada faktor yang dapat dikenali sebagai faktor yang mendahului yang lain. Ada perbedaan keyakinan, etnik, status sosial ekonomi, dan sebagainya menjadi gejala awal yang berpotensi menghasilkan gejala toleransi/intoleransi dan radikalisme. Namun, seperti yang diketahui bersama,

perbedaan itu seringkali merupakan situasi yang terberi dan tak terhindarkan. Juga perlu dipahami bahwa perbedaan itu tidak serta merta menghasilkan intoleransi apalagi radikalisme. Ada kepentingan ekonomi yang berperan menghubungkan perbedaan dengan intoleransi, yang jika semakin menguat nantinya dapat menghasilkan pula radikalisme.

Di sisi lain ada peran kehadiran negara, yang dapat mengurangi atau menguatkan peran kepentingan ekonomi dalam menghasilkan intoleransi. Kehadiran negara juga berperan dalam memperkuat hubungan antara perbedaan dan intoleransi. Faktor kehadiran Negara menjadi penting dalam konteks ini dan lebih dapat dikendalikan dari pada faktor perbedaan. Hadirnya negara menjadi faktor yang dapat diupayakan. Jika negara dapat menjalankan fungsinya dalam arti bersikap netral dan tegas, bekerja sesuai payung hukum yang tidak diskriminatif, antisipatif dengan menyiapkan semacam sistem peringatan dini kepada warga, maka kecenderungan intoleran dan radikal dapat dihindari dan dihilangkan. Negara yang mampu memediasi dan mengkoordinasi para pihak di masyarakat menjadi kunci penting bagi

lapisan berikutnya lagi, faktor pengaruh tokoh yang signifikan dan dianggap penting oleh warga turut berperan terhadap kecenderungan toleran/intoleran dan radikalisme. Di lapisan paling atas, kehadiran dan keberfungsian Negara berperan sebagai faktor penting dalam kecenderungan toleran/intoleran dan radikalisme.

Perbedaan keyakinan mempengaruhi toleransi/intoleransi bermuatan kepentingan ekonomi (termasuk juga kepentingan politik, yang bertujuan memperoleh sumber daya ekonomi). Perbedaan keyakinan atau etnik saja tidak signifikan pengaruhnya terhadap toleransi/intoleransi. Nilai budaya dan praktik sosial berperan sebagai moderator dalam hubungan antara kepentingan ekonomi dan toleransi/intoleransi, serta hubungan antara perbedaan dan toleransi/intoleransi. Radikalisme merupakan hasil pengaruh dari intoleransi. Semakin intoleran seseorang, semakin besar kemungkinannya untuk menjadi radikal. Gejala toleransi/intoleransi dan radikalisme memiliki lebih dari satu sebab (*multicausal*). Seperti gejala sosial pada umumnya, tidak ada penyebab tunggal dari toleransi/intoleransi. Meskipun demikian, berdasarkan model yang

dihasilkan studi ini, ada faktor yang dapat dikenali sebagai faktor yang mendahului yang lain.

Kepentingan ekonomi yang berperan menghubungkan perbedaan dengan intoleransi, yang jika makin menguat nanti dapat menghasilkan pula radikalisme. Di sisi lain ada peran kehadiran negara, yang dapat mengurangi atau menguatkan peran kepentingan ekonomi dalam menghasilkan intoleransi. Kehadiran Negara juga berperan dalam memperkuat hubungan antara perbedaan dan intoleransi. Jika nilai budaya dan praktik sosial yang sejalan dengan toleransi kuat, maka intoleransi dan radikalisme juga dapat dihambat, dan sebaliknya. Tetapi, peran nilai budaya dan praktik sosial akan lebih kecil jika sedari awal kehadiran Negara berperan optimal dan berfungsi untuk menghindarkan warga, untuk menjadikan perbedaan dan kepentingan ekonomi sebagai penyebab intoleransi dan radikalisme. Untuk dapat mendorong masyarakat Indonesia agar menjadi masyarakat yang toleran, kehadiran negara perlu diupayakan untuk mencegah terjadinya intoleransi dan radikalisme. Sebaliknya, jika negara justru mendukung atau membiarkan kecenderungan dan praktik intoleransi

berjalan, maka kemungkinan terjadinya tindakan intoleran sangat besar. Itu berlaku juga pada gejala radikalisme.

Daftar Pustaka

Azca, Muhammad Najib. 2013. *Yang Muda, Yang Radikal: Refleksi Sosiologis Terhadap Fenomena Radikalisme Kaum Muda Muslim di Indonesia Pasca Orde Baru*|| *Jurnal Maarif*, Vol. 8, No. 1 (Juli 2013): 14-41.

Cavatorta, Francesco. 2005. The 'War on Terrorism'—Perspectives from Radical Islamic Groups. *Journal of Irish Studies in International Affairs*, Vol. 16 (2005). Diakses dari http://doras.dcu.ie/488/1/isia_1_6_April_2017.pdf

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed.II; Jakarta: Balai Pustaka.

Fadjar, Abdullah dkk, 2007. *Laporan Penelitian Islam Kampus*. Jakarta:Ditjen Dikti Depdiknas.

Kushner, Harvey W. 2003. *Encyclopedia of Terrorism*, London : Sage Publication.

Marsh, David dan Gerry Stoker. 2002. *Theory and Methods in Political Science*. Hampshire: Palgrave Macmillan.

Moleong, Lexy J. 2004 . *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Peninjauan kembali Pendidikan Agama Islam. Dalam www.swatt-online.com/2017/04/lakip-pemerintah-harus-tinjaukembali-pendidikan-agama-islam/ di akses 10/04/2017 20:30 WIB

Rubaidi, A. 2010. *Radikalisme Islam, Nahdlatul Ulama; Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Logung Pustaka.

Terorisme di Indonesia, 2017. [http://id.wikipedia.org/wiki/Terorisme di Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Terorisme_di_Indonesia), diakses 20/04/2017, 20:39 WIB

U.S. Department of Justice, *Hate Crime: The Violence of Intolerance*, <http://www.usdoj.gov/crs/pubs/htecrm.htm>, diakses pada 1 Mei 2017, 22:04 WIB